

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari analisa yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak Restoran di Kota Kupang tahun 2017 – 2021 cukup bervariasi atau naik turun. Penerimaan tertinggi ada pada tahun 2019 yakni sebesar 122,01% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 89,52%.
2. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran di Kota Kupang tahun 2017 – 2021 tidak tetap atau mengalami naik – turun. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 22% dan terendah pada tahun 2021 sebesar - 1%.
3. Dampak Covid-19 terhadap PAD Kota Kupang adalah target dan realisasi penerimaan pajak Restoran tidak tercapai sehingga realisasi menurun.
4. Tata cara pemungutan pajak Restoran selama masa pandemi Covid-19 yakni tetap mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan menaati Protokol Kesehatan.

#### **6.2 Saran**

Beberapa saran yang diperoleh untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebaiknya tetap terus aktif dalam mensosialisasi wajib pajak khususnya pajak restoran tiap tahun yang mana melibatkan masyarakat dan pengusaha.

2. Meningkatkan pengawasan pajak restoran pada restoran dan rumah makan yang mana di tegaskan pada aturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi yaitu UU Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Nomor 2 tahun 2016.
3. Bagi peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran selama masa pandemi covid-19 di Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasannudin dan Wokas, R. N Heince (2013) *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard, 2013, *HUKUM PAJAK: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Edisi 6, Salembang Empat, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard, 2013, *HUKUM PAJAK: Teori*, Samudra, Ahzari Aziz, 2015, *PERPAJAKAN DI INDONESIA: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Leopold M.T Dawu dan Yolinda Yanti Sonbay. [ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUPANG | Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen \(unimor.ac.id\)](#)
- Mersita Putri, I., & Sugiyanto, E. (2016). *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 2009-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pohan, Chairil Anwar, 2018, *manajemen PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, PT Gramedia Building, Jakarta  
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 Tentang *Pajak Daerah*.
- Pramesti, Susilo, dan Saifi, 2016. *Realisasi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun*, Vol 9 No. 1. Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas Brawijaya.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/250/245>
- Priambudi, D. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Rahayu, Siti Kunia, 2017, *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*, Rekayasa Sains, Bandung
- Rosdiana, Haula, dan Irianto, Edi Slamet, 2012, *PENGANTAR ILMU PAJAK: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Samudra, A. A. (2020). *Perpajakan di Indonesia (keuangan, pajak dan retribusi daerah)*. Rajawali Pers,.
- Suryana, 2010. *Metodologi penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia

Suni, Y. M. S. (2006). “Analisis Pajak Daerah Dalam Penerimaan Daerah.” *Journal of economic* 06. (01)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*